

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU :

- Adi Rianto. (2015). *Aspek hukum dalam penelitian*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Agustina. (2018). *Hukum laut internasional*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ali H. Zainuddin. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chadhafi, Mochammad. (2021). *Diplomasi pertahanan maritime Indonesia di laut natuna utara*. Yogyakarta: Jejak pustaka.
- Dam, Syamsumar. (2010). *Politik kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danusaputro, Munadjat. (1982). *Wawasan nusantara dalam hukum laut internasional*. Bandung: Alumni.
- Efendi jonaedi dan Jhonny Ibrahim. (2016). *Penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hadiwijoyo, Suryosakti. (2008). *Batas wilayah Negara Indonesia “dimensi, permasalahan, dan strategi penanganan”* (sebuah tinjauan empiris dan yuridis). Yogyakarta: Gaya media.
- Hadiwijoyo, Suryosakti. (2011). *Perbatasan Negara dalam dimensi hukum internasional*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Hasan, A Yulia. (2020). *Hukum laut konservasi sumber daya ikan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Angkasa Offset Bandung.
- Latipulhayat, Atip. (2021). *Hukum interasional sumber-sumber hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma'rifat, Tian Nur dkk. (2020). *Dasar-dasar perikanan dan kelautan*. Malang: UB Press.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). *Pengelolaan perbatasan darat Indonesia-Timor leste di wilayah Enclave Oecussi*. Yogyakarta: GENTA Publishing
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Jawa tengah: penerbit lakeisha.

- Nikson, Willem. (2009). *Kewenangan Dan Identitas Lembaga Penjaga Laut Dan Pantai Sebagai Penegak Hukum Keselamatan*. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut.
- Pramono, Budi. (2021). *Penegakan hukum di perairan Indonesia*. Surabaya: Scopindo media pustaka.
- Rahim. (2021). *Pokok-pokok upaya hukum terhadap putusan pengadilan dalam perkara perdata*. Makassar: Humanities Genius.
- Sefriani. (2018). *Hukum internasional suatu pengantar edisi ke dua*. Depok: PT RajaGrafindo persada.
- Setiawan, asep. (2020). *Diplomasi maritime Indonesia dalam mejaga kedaulatan kepulauan natuna 2014-2019*. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Sodik, Dikdik Mohamad. (2016). *Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Starke, J.G. (2010). *Pengantar hukum internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyono, Hadi. (2017). *COLREG 1972 dan dinas jaga anjungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto. (2015). *Pengendalian keamanan dan keselamatan laut*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Utomo, Bambang Budi. (2016). *Warisan bahari Indonesia*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Wangke, Humphrey. (2018). *Diplomasi Indonesia dan pembangunan konektivitas maritime*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Widagdo, Setyo dkk. (2019). *Hukum internasional dalam dinamika hubungan internasional*. Malang: UB Press.
- Windari, Retno. (2009). *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 Dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut.

## **SKRIPSI:**

- Hehanussa, Julianingsih, 2018. Penegakkan hukum illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah laut Indonesia di tinjau dari hukum laut internasional. Skripsi. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Maulana, Tegar, 2021. Penerapan aturan P2TL saat dinas jaga laut pada situasi menyilang untuk menghindari bahaya tubrukan di atas kapal LPG GAS ARAR. Skripsi. Surabaya: Politeknik Pelayaran Surabaya
- Valentino, Ronaldo, 2019. Legal memorandum mengenai insiden kapal pengawas perikanan Vietnam dengan kapal republik Indonesia di wilayah laut natuna utara. Skripsi. Jawa barat: Universitas Padjajaran.

## **ARTIKEL DALAM JURNAL :**

- Anwar, Syaiful. 2018. *Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan Di Bidang Pertahanan*. Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara Universitas Pertahanan, 4 (2).
- Ardila, Putra. 2020. *Sengketa Wilayah Zona Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim China Atas Laut Natuna Utara)*. Journal Of Internasional Law Fakultas Hukum Universitas Jambi, 1 (3).
- Biasane, Indra, Dewi. 2017. *Penerapan Regulation For Prevention Collisions At Sea (COLREG 1972) Pada Kapal Berbendera Indonesia Di Pelabuhan Bitung*. Jurnal Penelitian Transportasi Laut, 19 (1).
- Chrystofer. 2017. *Penguatan Hubungan Politik Internasional Indonesia Dalam Mewujudkan Kedaulatan Poros Maritime Yang Ideal*. Jurnal Gema Keadilan.
- Fajrina, Puspayu. 2021. *Use Of Force Di Wilayah Laut Natuna Utara Antara Kapal Kri Tjiptadi-381 Dan Kapal Coast Guard Vietnam Menurut Hukum Laut Internasional*. Universitas Negeri Surabaya.
- Firdaus, Yuli Aos. 2020. *Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura*. Jurnal Ilmiah Indonesia, 5 (9).

- Ilmi, Nur. 2020. *Dampak Penamaan Laut Natuna Utara Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok*. *Journal Of International Relations*, 6 (4).
- Jamilah, Asiyah, Hari Sutra Disemadi. 2020. *Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982*. *Mulawarman Law Review*, 5 (1).
- Kaunang, Bahari Riyan. 2022. *Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna Utara) Sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan*. *Jurnal Lex Administratum*, 10 (1).
- Manik, Jeanne Dare Noviyanti. 2018. *Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara*. *Jurnal Hukum Progresif*, 12 (1).
- Miranda, Aichel. 2018. *Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia (Studi Kasus Tiongkok Di Laut Natuna Utara)*. *Jurnal Of International Relations*, 4 (4).
- Muhaimin, Ramdhan. 2018. *Kebijakan Sekuritisasi Dan Persepsi Ancaman Di Laut Natuna Utara*. *Jurnal Politica*, 9 (1).
- Novianto, Rizal Dwi, dkk. 2020. *Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara*. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3 (1).
- Sahri, Lukman. 2017. *Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna*. *Jurnal Internasional Dan Diplomasi*, 3 (1).
- Sambogo, Alief. 2018. *Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia*. *Jurist-Diction*, 1 (2).
- Santoso, Imam Totok. 2020. *Aksi Agresivitas China Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara (Perspektif Tugas Pokok TNI)*. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 41.
- Santoso, Iman. 2018. *Kedaulatan Dan Yuridiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian*. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7 (1).

Sigit, Novia Rahmawati. 2019. *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Di Perairan Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*. Jurnal Selat, 7 (1).

Sunyawati, Dina. 2013. *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2 (1).

Ugang, Yandi. 2018. *Hubungan Antara Wilayah Pemekaran Dengan Wilayah Induk (Studi Di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah)*. Jurnal Morality, 4 (1).

#### **ARTIKEL DALAM INTERNET :**

CCN Indonesia. 2019. *Ketegangan di Laut Natuna, Kapal Vietnam Tabrak Kapal TNI AL*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429083719-20-390387/ketegangan-di-laut-natuna-kapal-vietnam-tabrak-kapal-tni-al>. Diakses tanggal 22 Desember 2021.

Kompas.com. *Tabrak Kapal Nelayan RI di Natuna, China Langgar Hukum Internasional* tersedia pada <https://money.kompas.com/read/2020/01/10/143039626/knti-tabrak-kapal-nelayan-ri-di-natuna-china-langgar-hukum-internasional> (diakses tanggal 30 November 2021)

Sugihartono, Dwi. 2018. *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim*. Semarang: Joko Symponium.2021."Khatulistiwa",<https://id.wikipedia.org/wiki/Khatulistiwa>, diakses pada 3 September 2021.

Taher, Pratama, Andrian. 2019. *"Kronologi Insiden Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi versi TNI AL"*, <https://tirto.id/kronologi-insiden-kapal-vietnam-tabrak-kri-tjiptadi-versi-tni-al-dnhd>, diakses pada 3 September 2021.

Yuniarto, Top. 2021. *"Kedaulatan Maritim Indonesia"*, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kedaulatan-maritim-indonesia-sejarah-dan-potretnya>, diakses pada 3 September 2021.

## **KONVENSI INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG -**

### **UNDANGAN :**

Konvensi hukum laut PBB 1982 (*United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*).

Peraturan Internasional Untuk Mencegah Tubrukan Di Laut 1972 (*International Regulations For Preventing Collisions At Sea (COLREG)*).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44).

Undang-Undang No 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi *UNCLOS* 1982.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294).

